PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 10 Juni 2022 Halaman: 1

Belasan Bangunan Dilaporkan

■ Pemkot Cermati IMB Bermasalah di Era Haryadi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan peninjauan ulang terhadap belasan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan di era Haryadi Suyuti. Selain itu, eksekutif pun siap menampung setiap laporan dari publik yang melihat ketidakberesan mengenai proses tersebut.

Kebijakan itu seusai dengan upaya pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya sudah menaikkan status eks Wali Kota Haryadi Suyuti, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nurwidhihartana, sebagai tersangka.

Keduanya dinilai terlibat secara aktif dalam kasus jual beli perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Kemudian, pada Selasa (7/6), lembaga antirasuah melangsungkan penggeledahan maraton selama delapan jam penuh di kompleks Balai Kota Yogyakarta dalam rangka pengembangan kasus.

Ada belasan itu. Tapi, baru dicermati loh, karena ada indikasi. Terutama yang besar-besar. Kita belum bisa rilis, ya.

Sumadi
Pj Wali Kota Yogyakarta

• ke halaman 11

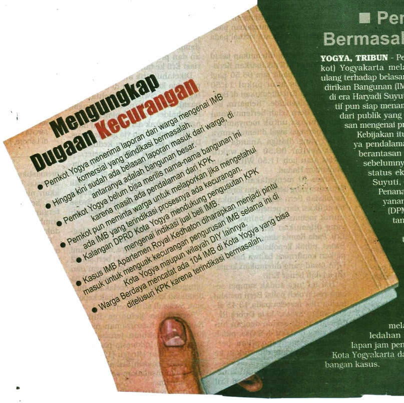

Belasan Bangunan Dilaporkan

• Sambungan **Hal 1**

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi menuturkan, pihaknya tentu tidak bisa memeriksa seluruh dokumen yang dikeluarkan di masa 10 tahun kepemimpinan Haryadi Suyuti. Sehingga, pemkot membutuhkan informasi dari warga jika di lingkungannya terindikasi ada pembangunan hotel atau bangunan komersial lain yang menabrak aturan.

"Kita enggak mungkin mencermati semua, kan, hanya yang sekiranya terindikasi saja. Maka, kami perlu masukan publik, dari masyarakat, kira-kira mana saja itu. Kami enggak bisa, ya, kalau cermati semua," jelasnya, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada laporan dari publik yang masuk dan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemkot Yogyakarta. Menurutnya, sebagian laporan yang masuk itu melibatkan bangunan-bangunan komersial, yang saat ini kadung berdiri kokoh di wilayah Kota Yogyakarta.

"Ada belasan itu. Tapi, baru dicermati loh, karena ada indikasi. Terutama yang besar-besar. Kita belum bisa rilis, ya, karena KPK juga sedang mendalami, kan. Kita enggak mungkin tanpa koordinasi dengan pihak KPK," papar Sumadi.

"Jadi, kalau publik melihat indikasi tolong sampaikan saja pada kami, akan kami dalami. Sudah ada kan beberapa yang masuk juga, laporan dari masyarakat, dan langsung saya minta untuk dicermati lebih lanjut itu," imbuh pegawai Pemda DIY ini.

Terkait jumlah perizinan hotel dan apartemen yang diterbitkan selama kepemimpinan Haryadi Suyuti, Sumadi mengaku belum tahu secara pasti. Tapi, ia berjanji bakal mencermati secara detail dan menertibkan jikalau ada bangunan yang menabrak peraturan.

"Saya kurang tahu pasti jumlah yang dikeluarkan di era itu, apakah ratusan atau ribuan, saya kurang tahu. Tetapi, yang besar-besar itu ada belasan, sudah saya sampaikan pada teman-teman untuk dicermati," terang Sumadi.

Bantuan hukum?

Pemkot Yogyakarta menegaskan, tidak akan memberikan bantuan hukum bagi seluruh tersangka kasus jual beli IMB yang menyeret Haryadi Suyuti. Dalam kasus yang mencuat dari pelanggaran IMB untuk apartemen Royal Kedhaton tersebut, selain Haryadi, ada eks Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana, dan eks ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono, yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sumadi menguraikan, kasus yang menjerat ketiganya adalah ranah pribadi. Maka, Pemkot Yogyakarta tidak mau ikut campur dan tidak bakal memberi bantuan hukum apa pun untuk mereka. "Tidak, itu kan kasus pribadi. Kami enggak akan itu (memberi bantuan hukum)," tegasnya.

Sebaliknya, Pemkot Yogyakarta siap bersinergi dengan lembaga antirasuah guna meninjau ulang deretan IMB yang terindikasi bermasalah. Terutama, yang izinnya sudah dikeluarkan selama masa kepemimpinan Haryadi Suyuti.

Desakan dewan

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra mengatakan, pihaknya terus mendesak agar semua perizinan di era kepemimpinan Haryadi Suyuti dapat ditelusuri. Dalam setiap rapat kerja bersama eksekutif, legislatif pun telah meminta keterbukaan mengenai polemik tersebut. "Supaya terang benderang dan tidak ada yang tersandera. Maka, semua perizinan di era Haryadi Suyuti harus diungkap, kami mendorong itu," tegas Candra.

Oleh sebab itu, politikus Partai Nasional Demokrat tersebut mengapresiasi KPK yang sudah menyatakan bakal menelusuri berbagai perizinan lain, yang diduga berkaitan dengan gratifikasi. Ia pun menilai, komitmen lembaga antirasuah membuat banyak pihak tidak nyaman. "Makanya, jangan sampai ada yang merasa tersandera jika memang tidak melakukan pelanggaran. Kembalikan semua selaras dengan peraturan hukumnya," ulasnya.

Candra pun memberi semacam petunjuk, di mana pengusutan dapat dimulai terhadap deretan bangunan komersial yang sebelumnya juga sempat jadi sorotan publik, baik hotel dan apartemen. Menurutnya, bangunan-bangunannya masih berdiri kokoh di jalan-jalan protokol Kota Pelajar. "Itu kan dokumen perizinannya, dimulai dari proses pengajuan, penolakan, sampai akhirnya terbit IMB, harusnya masih tercatat dengan baik di sana, ya," ungkap Candra.

Tapi, ia menyerahkan segala proses pengusutan tersebut pada KPK. Menurutnya, jikalau dijumpai unsur-unsur yang melanggar ketentuan, fenomena jual beli IMB dapat semakin terkuak, serta bukan tidak mungkin pihak-pihak yang terseret akan bertambah.

"Semua tergantung KPK, apakah akan berhenti pada kasus Royal Kedhaton ini atau merambah ke yang lain. Yang jelas, kalau pengembangannya membuahkan hasil, bisa jadi jumlah tersangkanya semakin banyak," katanya. "Sekarang yang harus dikuatkan adalah fungsi penegakan (peraturan). Iklim investasi bagi masyarakat itu akan tercipta manakala ada kepastian hukumnya," tambah Candra. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005